

KRIMINALITAS DI JAWA PADA MASA KOLONIAL

Fardan Tifaransyah¹, Anita Safitri², Prirobani Setyawan³, Dharu Sinar Mustikasari⁴, Eka Wahyu Lejaringtyas⁵

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Email: tifaransyah@students.unnes.ac.id¹, anitasafitri191@students.unnes.ac.id²,
prirobani@students.unnes.ac.id³, mustikasari2nd@gmail.com⁴,
ekawahyutyas123@students.unnes.ac.id⁵

Artikel info

Keywords:

Perbanditan, Jawa, Kolonial

Abstract. Criminal act must have happened in any region and in any period, with no exception during the colonial era in Indonesia. The crime that occurred at that time was generally a landmark. The culprit is the majority from farmers and lower indigenous people living in the countryside. There were several reasons behind this incident, but the main reason was that the rural people lost hope because of continued poverty, oppression, and various pressures from the colonial authorities. But this unique act of reliability does not merely take possessions for enrichment alone. There is something like that, but in fact there is also a robin hood-style signature act, which is the signature that will later be distributed to people in need. This action was also made an expression of impiety and a symbol of the people's resistance to colonialism. The reason why this event occurred in the village is one of them is that in the village the protection of the colonial side tends to be small, not as large as in the city center so the colonial side cannot control various crimes that occur. But the benchmarking that happened was just social benchmarking only, no benchmarking has yet been aimed at politically seizing colonizing power. This writing aims to explain the events of java's popularity during the colonial era and examine the reason for the event. Based on these objectives, this study uses related library study methods to obtain information.

Abstrak. Tindak kriminalitas pasti terjadi di setiap daerah manapun dan di zaman apapun, tak terkecuali saat era kolonial di Indonesia. Tindak kriminalitas yang terjadi saat itu umumnya berupa perbanditan. Pelakunya mayoritas dari kalangan petani dan rakyat pribumi bawah yang tinggal di pedesaan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kejadian ini, namun alasan utamanya adalah karena rakyat pedesaan kehilangan harapan karena terus di landa kemiskinan, penindasan, dan berbagai tekanan dari pihak kolonial. Tetapi uniknya tindakan perbanditan ini tidak semata-mata hanya mengambil harta untuk memperkaya diri saja. Memang ada yang seperti itu, namun pada kenyataannya ada juga tindakan perbanditan ala robin hood, yakni perbanditan yang nanti hasilnya akan di bagikan kepada orang yang membutuhkan. Aksi ini juga di jadikan sebagai ekspresi ketidak puasan dan simbol perlawanan rakyat kepada kolonial. Alasan mengapa peristiwa ini terjadi di desa adalah salah satunya karena di desa perlindungan dari pihak kolonial cenderung kecil, tidak sebesar di pusat kota sehingga pihak kolonial tidak bisa mengendalikan berbagai tindak kejahatan yang terjadi. Namun perbanditan yang terjadi hanya sekedar perbanditan sosial saja, belum ada perbanditan yang bertujuan politis untuk merebut kekuasaan penjajah. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peristiwa perbanditan di jawa saat era kolonial dan menelaah alasan terjadinya peristiwa tersebut. Dengan berdasar pada tujuan tersebut, kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan terkait untuk memperoleh informasi.

Corresponden author:

Email: tifaransyah@students.unnes.ac.id

A. PENDAHULUAN

Tindakan kriminal adalah semua sesuatu yang melanggar hukum. Kriminal menjadi masalah suatu negara yang mengharapkan keteraturan dan kedamaian. Akan tetapi kriminalitas biasanya juga di kelola negara untuk mempertahankan suatu kekuasaan. Pulau Jawa menjadi pusat perekonomian dan perindustrian di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Akibatnya perpindahan penduduk selalu terjadi dan menjadi faktor terjadinya kriminalitas. Biasanya ekonomi yang berpenghasilan rendah, menganggur atau kondisi miskin, menjadi alasan pelaku untuk mencuri atau merampok. Kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan tidak dapat dipenuhi dengan pendapatan yang sedang atau tidak mencukupi. Sementara itu, kebutuhan keluarga meningkat dari hari ke hari dan jumlah tanggungan yang signifikan, menemukan berbagai cara untuk menghasilkan pendapatan tambahan di mana keterampilan dan pendidikan sangat rendah. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan adalah dengan melakukan kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau penipuan.

Dalam karya sejarawan Suhartono, perbanditan di saat itu adalah tindak kriminal yang berkembang di masyarakat. Perbanditan dapat di artikan sebagai merampas harta milik orang lain. Biasanya perbanditan ini ditujukan sebagai aksi protes sosial terhadap pemerintah Hindia Belanda, bukan untuk memperkaya diri tetapi untuk kepentingan sosial. Kejahatan kriminal di masa sekarang tidak jauh berbeda dengan kejahatan kriminal di masa lalu. Di masa lalu tindak kriminal ada berbagai macam, seperti perbanditan (sekarang disebut premanisme) dan begal. Perbanditan di Jawa sudah terjadi sejak dulu yang terjadi di beberapa Kota seperti Batavia, Surakarta dan Yogyakarta, dan juga Probolinggo dan Pasuruan. Tindak kriminal perbanditan dan juga pembegalan ini juga mencakup tindak kriminal yang

lain, yaitu tindak kriminal kekerasan dan juga pemerasan.

Era kolonial, Jawa menurut Gubernur Thomas Stamford Raffles memiliki reputasi yang aman dan damai, akan tetapi itu salah besar. Sering terjadi pergolakan dan pertentangan antara Hindia Belanda dengan rakyat Indonesia atau antar rakyat Indonesia itu sendiri setiap waktu. Penjajahan ini tidak hanya menimbulkan masalah politik, melainkan masalah sosial juga seperti yang terjadi di desa yaitu pencurian, pembunuhan, perampokan, pembakaran rumah, dan pembakaran kebun. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara ilegal tanpa izin dengan pemiliknya. Pedesaan di era kolonial rentan atau mudah terjadi kriminalitas, alasannya yaitu karena tingkat pengangguran dan kemiskinan di pedesaan yang masih tinggi. Kriminalitas yang tinggi membuat masyarakat merasa resah dan takut untuk bepergian. Tindak kriminal ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan berkelompok (2 orang atau lebih).

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus (*case studi*). Data studi kasus diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini sumber yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya. Selain itu, teknik pengumpulan data ini menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan data-data mengenai penelitian dan hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang dinilai relevan dengan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemicu Kriminalitas di Jawa

Pulau Jawa selalu dikenal sebagai kepulauan yang subur dengan keragaman

tumbuhan yang dimiliki, namun dalam sejarah pulau Jawa mengandung banyak peristiwa yang penuh dengan berbagai gejolak, konflik hingga peperangan. Terjadinya kekerasan dan kriminalitas di suatu daerah pasti berkaitan dengan masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Pada abad ke sembilan belas sejak masa pemerintahan kolonial, berbagai bentuk tindak kekerasan dan kriminalitas kian marak terjadi terutama di daerah Jawa seperti penipuan, pencurian, pencopetan, penjabretan, perampasan, pembegalan hingga penodongan. Para pelaku aksi-aksi tersebut biasanya disebut sebagai bandit yang mana kehadirannya dirasa mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Namun, menurut Ari Kurnia (Kurnia, 2012), bagi masyarakat luas, bandit dipandang sebagai seorang pahlawan atau pembela masyarakat yang mengalami berbagai tekanan dari pemerintah kolonial, penguasa pribumi maupun penguasa perkebunan swasta.

Melalui pernyataan dari Ari Kurnia tersebut dapat dikatakan bahwa fenomena perbanditan merupakan bentuk protes sosial akibat dari kemiskinan, penindasan, dan berbagai tekanan dari pihak kolonial. Bandit sebagai pelaku aksi kekerasan dan kriminalitas ini merupakan pandangan dari pemerintah kolonial melalui hukum formal yang dilanggar oleh para bandit, sedangkan menurut pandangan masyarakat sebagian bandit dipandang sebagai seorang pahlawan yang berani menentang kebijakan dari pemerintah kolonial seperti sistem tanam paksa, pelaksanaan politik liberal, dan perluasan perkebunan di pedesaan (Kurnia, 2012). Tekanan yang diterima oleh para petani mulai dari upah yang rendah, kebutuhan hidup yang meningkat, beban kerja wajib, hingga beratnya pajak yang harus dilunasi telah menggambarkan bahwa mereka hidup dalam kemiskinan dengan kehidupan yang tidak terkendali hal tersebut mendorong mereka untuk mencari

pendapatan tambahan dengan jalan pitis seperti menjadi bandit.

Berbagai upaya dalam memperebutkan kekuasaan juga menjadi pemicu terjadinya aksi kekerasan politik yang dipengaruhi oleh terciptanya state of violence atau negara kekerasan. State of violence yang lahir pada masa pemerintahan kolonial ini telah menjadi akar dari munculnya berbagai tindak kekerasan dan kriminalitas bahkan pada perkembangannya pemerintah kolonial mulai menerapkan regime of fear (rezim ketakutan) yang mana hal tersebut memberikan kesempatan kepada kelompok kriminal untuk berkembang dan menyebar secara luas (Pribadi, 2012, p. 60). Berbagai macam hukum diskriminatif dibuat untuk mengatur mereka dengan cara paksa. Yanwar Pribadi (Pribadi, 2014) mengemukakan, perbedaan ini yang berdasarkan kepada status ras seseorang menentukan di mana seseorang bisa hidup, pajak apa yang harus dibayar, dan juga hukuman apa yang diterapkan jika mereka melanggar hukum.

Selain itu terdapat alasan lainnya yang menjadi faktor munculnya fenomena kekerasan dan kriminalitas yakni peranan pemerintah kolonial dalam berupaya untuk memodernisasi kota dengan menerapkan standar penataan kota barat, hal ini bermaksud untuk memperbaiki kampung kumuh, menata kota agar teratur, tertib, dan makmur (Wijayati, 2020). Transformasi dari kota tradisional ke kota modern ini telah membentuk kelompok pada tatanan sosial di perkotaan yakni pemukiman kampung kota yang ditempati oleh masyarakat kalangan atas seperti pejabat kolonial dalam lingkup wilayah ruang privat dan ruang publik diperuntukan penduduk kota maupun luar kota dengan berbagai kelengkapan infrastruktur kota seperti infrastruktur politik, budaya dan ekonomi. Kemajuan tersebut mampu meningkatkan kepadatan aktivitas penduduk, namun peningkatan tersebut juga tidak terlepas dari aksi-aksi para bandit yang melancarkan kegiatannya

ditengah kepadatan aktivitas tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Putri Agus Wijayati (Wijayati, 2020), bahwa tingkat kriminalitas cenderung terkonsentrasi di ruang pasar, sekitar pasar, jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang Akan pergi atau pulang dari pasar.

Secara garis besar, pemicu dari munculnya aksi kekerasan dan kriminalitas dari para bandit ini dikarenakan keterhimpitan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Rendahnya pendapatan serta banyaknya tuntutan kebijakan dari pemerintah kolonial menjadikan masyarakat hidup dalam kemiskinan sehingga memaksa mereka untuk menambah pendapatan dengan Cara lebih cepat yakni menjadi bandit.

Bentuk-Bentuk Kriminalitas

Pada saat masa kolonial, daerah pedesaan di Nusantara terutama di Jawa mengalami masa sulit. Daerah pedesaan secara umum terpisah dengan daerah lainnya. Pemerintah kolonial juga terkesan abai dengan daerah pedesaan karena tampak kurang memberi perhatian juga perlindungan terhadap warga di pedesaan (Pribadi, 2014). Akibatnya di pedesaan banyak terjadi tindak kriminalitas, umumnya adalah tindak perbanditan, walaupun ada juga bentuk kriminalitas yang lain.

Seorang sejarawan sosial bernama Eric Hobsbawn membagi tiga jenis perbanditan, yang pertama perampok bermartabat seperti Robin Hood, yang kedua kelompok gerilya, dan yang terakhir kelompok penebar teror. Di Jawa sendiri tindak perbanditan di masa itu sudah lazim terjadi sebagai bentuk protes sosial dari para petani. Bahkan karena sampai membuat pihak berwenang kesulitan menanganinya, tindak perbanditan ini sampai dikategorikan sebagai tindak pemberontakan sederhana. Di era ini tokoh-tokoh pemimpin informal seperti kyai atau guru agama sangat berpengaruh, bahkan bisa diasumsikan sebagai tokoh politik yang sangat dihormati. Kebanyakan

para bandit yang berasal dari kaum tani sebelum menjadi bandit mereka berguru di lembaga keagamaan untuk belajar ilmu, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu bela diri dan gaib.

Karena tindak perbanditan ini adalah bagian dari protes sosial, dalam prakteknya mereka tidak hanya mengambil harta saja, tapi juga sering kali merusak berbagai aset milik perusahaan yang dimiliki oleh penguasa saat itu. Contohnya di beberapa tempat ditemukan perusakan terhadap kebun tebu, saluran irigasi, los tembakau, gudang, dan beberapa bangunan lain milik perusahaan itu. Di beberapa daerah banyak bermunculan para “kecu” yang menjadi aktor dari perbanditan ini. Di Vorstenlanden (Yogyakarta dan Surakarta) misalnya, sasaran perampokan adalah pihak perkebunan, pabrik, dan orang Tionghoa. Ada juga di Batavia, sasarannya adalah para Tuan tanah dan orang Tionghoa. Lalu di Probolinggo dan Pasuruan banyak terjadi pembakaran kebun tebu dan bedeng tempat penyimpanan tembakau (Subarkah, 2019).

Ternyata selain bentuk perbanditan seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, ada juga bentuk perbanditan lain yang sedikit berbeda, yaitu perbanditan yang dikaitkan dengan hal mistis. Biasanya perbanditan jenis ini ditandai dengan adanya orang yang mengklaim dirinya sebagai utusan tuhan dan bertujuan untuk membebaskan rakyat dari penindasan (Subarkah, 2019). Contoh perbanditan jenis ini adalah perbanditan yang dilakukan oleh Mas Zakaria dari Banten, Entong Gendut di Batavia, serta para kelompok kecu di Surakarta dan Yogyakarta.

Terkait perbanditan di Jawa ini, Heri Priyatmoko yang merupakan seorang sejarawan berpendapat bahwa di masa itu ada muncul perbanditan ala Robin Hood yang membagikan hasil rampokannya kepada rakyat miskin. target dari perbanditan ini adalah orang kaya Tionghoa, tuan tanah pribumi, ataupun

bangsawan yang suka sewenang-wenang menarik pajak dan menyengsarakan rakyat.

Dalam praktiknya, para bandit memiliki jabatan dan tugas masing-masing.

- a. Benggol, merupakan jabatan tertinggi dalam struktur organisasi bandit. Biasanya seorang benggol memiliki semacam kesaktian atau ilmu yang mana ilmu itu akan diajarkan kepada para anggotanya. Tujuan dari adanya ilmu itu adalah untuk memperkuat kelompok dalam menjalankan aksinya. Benggol juga biasanya bersikap ramah kepada masyarakat untuk tujuan menarik simpati mereka.
- b. Wakil benggol, seperti tugas wakil pada umumnya, wakil benggol berperan sebagai orang kepercayaan dari benggol dan yang akan menggantikan peran benggol jika sang benggol sedang berhalangan.
- c. Pemegang harta rampokan, seperti namanya tugas mereka adalah untuk bertanggung jawab terhadap harta rampokan. Termasuk dalam menyimpan dan mendistribusikan harta rampokan. Bisa ke ke para anggota lain maupun kepada masyarakat yang membutuhkan.
- d. Telik sandi, bertugas untuk memantau keadaan lingkungan sekitar target yang akan dirampok.
- e. Cungkuk, bertugas memantau keadaan saat melakukan aksi perampokan. Mereka juga yang memberi isyarat kapan mulai dan berhentinya perampokan
- f. Bala-bala, bertugas sebagai kelompok yang akan menghadapi serangan dari para korban. Selain itu juga bertugas untuk mengangkut hasil rampokan

Dampak Perbanditan Dalam Bidang Sosial dan Ekonomi

Berbagai masalah sosial dan ekonomi telah menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku menyimpang seperti tindak kejahatan kriminalitas. Makin maraknya kriminalitas yang terjadi di Jawa pada masa Kolonial dapat dilihat dari lahirnya bentuk-bentuk komunitas perbanditan yang dibagi menjadi tiga jenis oleh Eric Hobsbawm, yakni Robin Hood, Gerilya, dan Penebar teror. Perbanditan tersebut tentu saja memberikan dampak dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam bidang sosial, dampak dari aksi perbanditan sangat dirasakan oleh pemerintah kolonial dan pemilik perusahaan perkebunan swasta. Perbanditan yang berkembang sebagai bentuk perilaku menyimpang tentunya menimbulkan keresahan masyarakat. Akibat dari maraknya perbanditan terutama di daerah sekitar perkebunan yang menjadi sasaran para bandit dalam menjalankan aksinya mengakibatkan banyak kematian. Sehingga, tingkat keresahan masyarakat terhadap tindak perbanditan makin meningkat dan mempengaruhi rendahnya pertumbuhan penduduk di daerah perkebunan (Kurnia, 2012). Kehadiran para bandit-bandit yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan daerah ternyata bertolak belakang dengan anggapan masyarakat luas terhadap tindak perbanditan yang terjadi. Memiliki rasa sepenanggungan senasib antara masyarakat dan bandit menjadikan hubungan mereka berjalan dengan baik. Para bandit kerap kali membantu para petani sebagai pemilik lingkungan dan masyarakat pun ikut mendukung aksi-aksi dari perbanditan. Oleh sebab itu, bagi masyarakat luas bandit dianggap sebagai pahlawan atau pembela masyarakat yang bersama-sama melawan pihak-pihak yang merugikan masyarakat seperti pemerintah kolonial, penguasa pribumi dan penguasa perkebunan swasta.

Pengaruh perbanditan dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari dampak

yang diterima oleh pemerintah kolonial dan masyarakat miskin serta para petani. Pihak-pihak yang sering merugikan masyarakat menjadi pihak yang dirugikan secara finansial atas kegiatan dari perbanditan. Pemerintah kolonial, penguasa pribumi dan penguasa perkebunan swasta menjadi sasaran para bandit dalam menjalankan aksinya dengan mencuri uang dan barang-barang mereka lalu kabur dan bersembunyi di hutan sampai ke daerah-daerah terpencil. Agar lolos dari pengejaran, bandit melakukan penyamaran sebagai anggota organisasi desa bersama dengan para bandit lainnya. Hidup dalam keadaan sosial-ekonomi yang sama, masyarakat dan para petani menjadi pihak yang mendapat keuntungan dari kegiatan perbanditan. Sebab, hasil dari perbanditan tersebut sebagian dibagikan kepada masyarakat miskin dan para petani sehingga mereka dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Peran Pemerintah Kolonial Dalam Memberantas Perbanditan di Jawa

Kasus kriminalitas di Jawa pada masa kolonial sangatlah tinggi, mulai dari perbanditan, perampokan, serta tindak kekerasan yang dilakukan oleh para kelompok kecu. Kasus perbanditan dan perampokan merupakan suatu teror bagi masyarakat pribumi khususnya bagi para petani. Ancaman perebutan lahan serta tindak kekerasan yang dilakukan oleh para bandit atau rampok menimbulkan sebuah kecemasan dan ketakutan bagi para petani. Para bandit ini biasanya melakukan aksinya secara berkelompok, mereka mendatangi para petani secara terang-terangan dan melakukan perusakan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh para petani dan melakukan tindak penganiayaan dan kekerasan tanpa pandang bulu. Banyaknya rampok, bandit, dan orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya pada era tersebut mengakibatkan melonjaknya kasus kriminalitas di Jawa pada masa kolonial.

Melihat melonjaknya kasus kriminalitas di Jawa pemerintah kolonial melakukan berbagai macam upaya untuk memberantas kasus kriminalitas di Jawa. Seperti yang dijabarkan oleh Yanwar Pribadi (Pribadi, 2014) dalam bukunya yang berjudul *Strongmen dan Kelompok Kekerasan di Jawa*, pemerintah kolonial mengirimkan Marsose untuk memberantas para bandit serta rampok di Jawa. Pemerintah kolonial memanfaatkan penguasa-penguasa lokal serta ajudan-ajudannya untuk menginvestigasi atau kata lainnya memata-matai tindak kriminalitas di desa-desa di wilayahnya. Selain hal tersebut pemerintah kolonial juga membentuk polisi-polisi desa atau disebut sebagai jagabaya, mereka diberikan tugas oleh pemerintah kolonial untuk mencegah pelanggaran yang berkaitan langsung dengan tindak kejahatan berat seperti pembunuhan, pencurian, pembakaran, perampokan serta perkelahian yang terjadi pada warga desa. Jagabaya sendiri bukanlah masyarakat desa biasa mereka memiliki kemampuan dalam ilmu ghaib dan memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni dan mereka bekerja pada orang-orang yang membayar mereka. Para pemerintah kolonial ini mempercayai tradisi lama Jawa yakni menangkap pencuri dengan pencuri sehingga mereka yakin bahwa menggunakan jasa para jagabaya ini adalah hal yang paling efektif dalam memberantas perbanditan di Jawa. Selain bekerjasama dengan jagabaya, pemerintah kolonial melakukan pengejaran terhadap para kelompok bandit atau kecu. Seperti contohnya pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V, sekelompok perampok yang memiliki Nama Gobang Kinosek ditangkap dan kepalanya dipenggal lalu ditunjukkan kepada para bandit-bandit besar lainnya sebagai ancaman dan peringatan bahwa hukuman yang diberikan kepada para bandit-bandit yang berbahaya seperti mereka tidaklah main-main.

Selain hal di atas upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk

mengatasi kasus-kasus kriminalitas adalah dengan dilakukannya ronda malam, para pemerintah kolonial mengumumkan tentang bahayanya kecu dan cara pencegahannya kepada para masyarakat diantaranya adalah membuat pagar di sekeliling rumah, menutup akses masuk ke desa di malam hari dan melakukan penjagaan di pos jaga, penjagaan tersebut dilakukan dengan cara bergiliran oleh para jawara yang telah direkrut oleh Pemerintah kolonial. Dalam pelaksanaannya para peronda diperbolehkan untuk membawa senjata sebagai alat untuk menjaga diri, senjata-senjata yang dibawa biasanya adalah granggang (tombak yang berasal dari kayu aren) dengan mata tombak yang berbeda-beda, pentungan, dan tali dadhung, selain alat-alat untuk menjaga diri, para peronda juga diwajibkan untuk membawa alat pemadam kebakaran, yang tidak lain adalah tepas besar yang terbuat dari rotan ataupun bambu, kain lap, ruas bambu sebagai penampung air, dan ganthol yakni tangkai panjang yang digunakan untuk menarik sasaran. Warga tidak diperbolehkan untuk mengatasi sendiri apabila terdapat aksi kriminalitas di daerahnya, mereka harus melaporkan aksi kriminalitas tersebut dengan beberapa isyarat bunyi yang dilakukan dengan cara memukul kentongan dengan ritme yang berbeda. Terdapat beberapa makna dari ritme pukulan kentongan. Pertama, apabila pukulan dilakukan secara berkali-kali atau disebut kenthong titir hal tersebut menandakan adanya kasus kecu. Kedua, apabila ketongan dipukul dua kali atau disebut kenthong loro hal ini menandakan adanya kasus pencurian. Ketiga, apabila kenthongan dipukul sebanyak tiga kali atau disebut kenthong telu hal ini berarti menandakan terjadinya kebakaran. Keempat, apabila kenthongan dipukul sebanyak empat kali atau disebut kenthong papat hal ini menandakan terjadinya banjir. Terakhir, apabila kenthongan dipukul sebanyak lima kali atau kenthong lima hal ini menandakan telah terjadi pencurian hewan. Isyarat ini tentunya telah dipahami

oleh para warga, dan apabila isyarat-isyarat tersebut dibunyikan maka para warga akan sesegera mungkin keluar rumah untuk memberikan pertolongan pada korban atau peronda, (Hanggoro, 2019).

Berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial dalam memberantas kasus perampokan, pencurian dan perbanditan di Jawa. Akan tetapi, jika ditelisik lebih jauh lagi upaya-upaya tersebut hanya berhasil pada daerah-daerah Jawa yang terdapat penduduk Eropa. Perampokan, pencurian, serta kekerasan yang terjadi pada perkampungan Jawa yang tidak terdapat sama sekali penduduk Eropa tetap saja terjadi dan terdapat beberapa desa yang malah diberikan perlindungan oleh pemimpin bandit dengan tujuan agar desa tersebut tidak mengalami kasus pencurian, perampokan, serta kekerasan oleh bandit-bandit yang lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kolonial belum bisa dikatakan berhasil dalam membebaskan desa-desa di Jawa dari kasus kriminalitas seperti pencurian, perampokan, serta kekerasan.

Aksi-aksi perbanditan ini lambat laun kian menurun bukan dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial, kasus perbanditan ini mulai menurun dimana mulai munculnya organisasi-organisasi modern pada awal abad ke-20. Organisasi-organisasi tersebut menyalurkankan suara rakyat atau Wong cilik, seperti petani, buruh, dan kuli perkebunan. Dengan adanya organisasi-organisasi ini mewakili tuntutan rakyat mengenai penertrasi perkebunan.

Contoh-contoh organisasi modern yang mewakili suara rakyat mengenai kehidupan-kehidupan perkebunan di antaranya adalah Personeel Fabriek Bond (PFB) Di Yogyakarta, organisasi ini merupakan organisasi serikat buruh yang memiliki tujuan untuk membela kepentingan kaum buruh, organisasi ini sebenarnya lebih dikenal sebagai sarekat tani (Ratna, 2016). Di pasuruan dan Probolinggo, para petani bergabung

dengan organisasi Sarekat Islam yang sejalan dengan protes para petani pada penetrasi perkebunan. Setelah kemunculan Organisasi Sarikat Islam ini pembakaran perkebunan di daerah Probolinggo dan Pasuruan ini semakin lama semakin menurun (Purwaningsih & Aji, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa dengan munculnya organisasi-organisasi modern ini aspirasi masyarakat telah tersampaikan dengan baik, sehingga sejak saat itulah kasus kriminalitas perbanditan sosial menghilang dan hanya menyisakan kasus kasus perbanditan biasa.

C. KESIMPULAN

Tindakan kriminal adalah semua sesuatu yang melanggar hukum. Kriminal menjadi masalah suatu negara yang mengharapkan keteraturan dan kedamaian. Akan tetapi kriminalitas biasanya juga di kelola negara untuk mempertahankan suatu kekuasaan. Kejahatan kriminal di masa sekarang tidak jauh berbeda dengan kejahatan kriminal di masa lalu. Di masa lalu tindak kriminal ada berbagai macam, seperti perbanditan (sekarang disebut premanisme) dan begal. Perbanditan di Jawa sudah terjadi sejak dulu yang terjadi di beberapa kota seperti Batavia, Surakarta dan Yogyakarta, dan juga Probolinggo dan Pasuruan. Era kolonial, Jawa menurut Gubernur Thomas Stamford Raffles memiliki reputasi yang aman dan damai, akan tetapi itu salah besar. Sering terjadi pergolakan dan pertentangan antara Hindia Belanda dengan rakyat Indonesia atau antar rakyat Indonesia itu sendiri setiap waktu. Penjajahan ini tidak hanya menimbulkan masalah politik, melainkan masalah sosial juga seperti yang terjadi di desa yaitu pencurian, pembunuhan, perampokan, pembakaran rumah, dan pembakaran kebun. Pedesaan di era kolonial rentan atau mudah terjadi kriminalitas, alasannya yaitu karena tingkat pengangguran dan kemiskinan di pedesaan yang masih tinggi. Kriminalitas yang tinggi membuat masyarakat merasa resah dan takut untuk bepergian. Tindak kriminal ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang

saja, melainkan berkelompok (2 orang atau lebih). Pulau Jawa selalu dikenal sebagai kepulauan yang subur dengan keragaman tumbuhan yang dimiliki, namun dalam sejarah pulau Jawa mengandung banyak peristiwa yang penuh dengan berbagai gejala, konflik hingga peperangan. Terjadinya kekerasan dan kriminalitas di suatu daerah pasti berkaitan dengan masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Pada abad ke sembilan belas sejak masa pemerintahan kolonial, berbagai bentuk tindak kekerasan dan kriminalitas kian marak terjadi terutama di daerah Jawa seperti penipuan, pencurian, pencopetan, penjambretan, perampasan, pembegalan hingga penodongan. Para pelaku aksi-aksi tersebut biasanya disebut sebagai bandit yang mana kehadirannya dirasa mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari tindak kriminal yaitu menimbulkan keresahan terutama pemerintah kolonial, sedangkan bagi masyarakat bandit dianggap sebagai pahlawan. Dalam bidang ekonomi perbanditan merugikan para petani karena menjadi sasaran untuk mencuri uang dan barang berharga lainnya.

Daftar Pustaka

- Agus Wijayati, Putri. *Kekerasan dan Kriminalitas di Kota Semarang: Antara Negara Kolonial dan Otoritas Lokal*. Makassar: Al-Qalam, 2019.
- Kurnia, Ari. *Perbanditan Sosial di Klaten Tahun 1870-1900*. Surakarta: Digital Library UNS, 2012.
- Pribadi, Yanwar. *Akar Sejarah Kekerasan Di Indonesia: Pengaruh Asing Atau Tradisi Local?*. Banten: Tsaqofah, 2012.
- Pribadi, Yanwar. *Strongmen dan Kelompok Kekerasan di Jawa; Perkembangan dan Realisasinya dengan Kekerasan Masa dalam Bingkai Budaya dan Politik di Indonesia*. Serang: FTK Banten Press & LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014.

Purwaningsih, Sri Mastuti dan Thomas Nugroho Aji. *Sejarah Sosial*. Surabaya: Unesa University Press, 2020.

Ratna, Dewi. (2016). *Organisasi Buruh dan Sejarah Perjuangannya di Indonesia*. Merdeka. <https://www.merdeka.com/pendidikan/organisasi-buruh-dan-sejarah-perjuangannya-di-indonesia.html> (Di akses pada 23 November 2021).

Subarkah, Muhammad. (2019). *Ratu Adil, Rusuh Sosial: Perbanditan Jawa Masa Kolonial*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/q0v0x6385/ratu-adil-rusuh-sosial-perbanditan-jawa-masa-kolonial> (Di akses pada 23 November 2021).

Tri Hanggoro, Hendaru. *Cara Pemerintah Kolonial Redam Bandit Sosial*. Historia. <https://www.republika.co.id/berita/q0v0x6385/ratu-adil-rusuh-sosial-perbanditan-jawa-masa-kolonial> (Di akses pada 23 November 2021).